



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PERTANAHAN  
KOMISI II DPR RI KE KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019  
TANGGAL 17 JANUARI 2019**

---

## **I. Pengantar**

Dalam upaya melakukan kunjungan spesifik di Kabupaten Tangerang maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan masalah pertanahan ke Kabupaten Tangerang, adapun kunjungan tersebut untuk melihat sejauhmana program pemerintah terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria dan konflik pertanahan yang ada Kabupaten Tangerang. Sebagai sebuah sinergitas program PTSL, reforma agraria, maka kunjungan ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pertemuan masalah pertanahan tersebut agar menjadikan persoalan-persoalan tanah dapat dikoordinasikan antara pemerintah daerah cq Kabupaten Tangerang dengan Kantor BPN Kabupaten Tangerang. Turut hadir Direktur Penanganan Perkara Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI Ketut Mangku, A.Ptnh, SH, MH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Andi Tanri Abeng dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, Himsar, A.Ptnh. bersama jajaran dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, pertemuan berlangsung bertempat di Ruang Rapat Wareng Lantai III Gedung Kantor Bupati Tangerang.

## **II. Hasil Kunjungan Dengan Bupati Tangerang**

Pertemuan diawali dengan sambutan oleh Sekda Kabupaten Tangerang Drs. Moch Maesyah Rasyid, MSi mewakili Bupati Ahmed Zaki Iskandar. Selanjutnya acara diisi dengan sambutan Ketua Tim Kunspek Dr. Mardani, MEng dan perkenalan anggota tim Kunspek Komisi II DPR RI. Perkenalan tersebut dilanjutkan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunspek.

## **Sambutan Sekda Kabupaten Tangerang**

Sekda Kabupaten Tangerang Drs. Moch Maesyal Rasyid, MSi menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Tangerang sebagai tempat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI. Secara geografis Kabupaten Tangerang saat ini memiliki luas wilayah sebesar 956,61 km<sup>2</sup> dengan 29 Kecamatan, 246 Desa, dan 28 Kelurahan dengan total jumlah penduduk mencapai kurang lebih sebanyak 3,5 Juta Jiwa.

Dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 02 Tahun 2018, Alhamdulillah mendapatkan respon positif dari masyarakat serta dapat membantu masyarakat dalam administrasi pertanahan. Pemda melihat manfaat program PTSL dapat membantu masyarakat dalam mengadministrasikan tanah menjadi kepemilikannya

## **Sambutan Ketua Tim Kunspek Dr. Mardani, MEng.**

Kami ingin melihat sejauhmana program PTSL, reforma Agraria dan konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Tangerang dapat berlangsung sesuai harapan. Dan saat ini Komisi II DPR RI ini sedang proses pembahasan tingkat I terkait penyusunan Rancangan Undang-undang Pertanahan. Dari 900 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah, saat ini telah diselesaikan 400 DIM. Selanjutnya Kami melihat Kabupaten Tangerang ini punya banyak potensi, terkait dengan luas wilayahnya, untuk itu kami ingin menggali permasalahan yang ada khususnya terkait PTSL.

## **Pemaparan Kepala Kanwil BPN Prov. Banten Andi Tanri Abeng**

### **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Saya secara umum target tahun 2018, ada 400.000 bidang dengan 7 satker jadi kalau dibagi satker rata-rata 60.000 bidang, dan ini termasuk capaian yang bagus karena rata-rata di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur target mereka besar akan tetapi mereka memiliki 20 satker dan kami telah menyelesaikan target 463.000 pengukuran, capaian 442.000 bidang diselesaikan. Kami siap melaksanakan PTSL, reforma agrarian. Saat ini tahun 2019 target ada 35 ribu bidang di Kabupaten Lebak, Serang dan Pandeglang, sementara itu untuk PTSL Kota di Banten, seperti Kota Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan sesuai target. Memang harus diakui, untuk kabupaten belum maksimal .

Pada tahun ini kami memiliki metode percepatan untuk menyelesaikan target, yakni dengan cara menyelesaikan target pada triwulan 1, sedangkan triwulan 2 kami melakukan kwaliti control, selanjutnya pada triwulan 3 kami mulai menyelesaikan target tahun 2020. Agar target-target tersebut tercapai maka kami menggunakan partisipasi masyarakat untuk peta kerja berbasis dengan aplikasi yang ada di playstore, sehingga dengan partisipasi masyarakat tersebut akan terkumpulkan peta2 yang dibuat oleh masyarakat. Agar pola tersebut dapat terlaksana kami melatih karang taruna, dan para pemuda di desa-desa. Dalam beberapa bulan kedepan akan dilakukan pelatihan bekerjasama dengan STPN untuk mempercepat pembelajaran aplikasi tersebut di tingkat desa. Aplikasi tersebut dibuat oleh STPN

dan sudah diluncurkan, dengan nama aplikasi smart PTSL yang dapat diunduh di playstore secara gratis. Aplikasi tersebut mudah dikerjakan di tingkat desa.

Kami berkeyakinan bahwa road map sampai dengan tahun 2025 dapat kami selesaikan, bahkan hal tersebut apabila diagendakan akan lebih cepat selesai pada tahun 2022. Untuk itu kami sudah dapat dukungan dari KDH, tinggal di bawahnya di tingkat desa perlu dukungan dari pak sekda untuk mempercepat proses PTSL. Untuk itu kita juga akan membangun peta dengan drone sehingga akan lebih cepat. Memang tidak seakurat dengan peta kadastral, akan tetapi peta drone untuk mempercepat saja yang kemudian tetap didukung dengan peta kadastral.

Selanjutnya kami bersyukur tahun ini telah terbeli 1200 alat ukur untuk seluruh Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi II DPR RI. Selain daripada itu kami meminta dukungan dari Komisi II DPR RI agar para kepala daerah dapat mengarahkan para Kepala Desa agar mereka dapat membantu terlaksananya PTSL di tingkat desa. Karena kadang para kepala desa kurang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan PTSL.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tangerang yang telah membangun ruang arsip di Kantor BPN Tangerang seharga 5 Milyar, tentu kami akan lebih bergembira bila kami juga dibantu mengisi ruang arsip tersebut. Adalah kenyataan bila kebutuhan ruang arsip adalah kebutuhan kami saat ini, baik di Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan kantor-kantor lain. Kami memiliki harapan selain ruang arsip kami juga membutuhkan mesin scan yang besar sehingga kedepan arsip-arsip tersebut tersimpan secara digital. Kami saat ini mulai merintis arsip modern di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, disana kurang lebih sudah ada 45.000 dokumen yang discan. Kita harapkan dukungan Komisi II untuk dapat membelikan scanner per kantah dengan spesifikasi yang besar dan bagus .

## Reforma Agraria

Untuk Program Reforma Agraria kami sudah menyerahkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 48,7 hektare di Desa Mekarsari, Tanjung Lesung, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang kepada ratusan penggarap. Nantinya mereka akan mendapatkan sertifikat tanah dari BPN Banten dalam program reforma agraria melalui konsolidasi tanah.

Kampung agraria ini bentuk komitmen dan perhatian pemerintah, dengan memberikan tanah masing masing seluas 200 meter berikuit sertifikat kepada masyarakat penggarap di lahan eks HGU seluas 70 ha yang sudah habis ijinnya sejak tahun 1975, dalam program reforma Agraria melalui konsolidasi tanah. Kemudian para penggarap juga mendapatkan lahan pertanian seluas 1100 meter untuk digarap bersama secara berkelompok. Saat ini mereka telah ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk menanam palawija di lahan itu. kelompok tani tersebut membudidayakan jagung, lele.

Untuk masalah sertipikat maka BPN akan mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah sebanyak 225 bidang untuk masyarakat penggarap lahan eks HGU tersebut, agar masyarakat nantinya memiliki bukti sah kepemilikan tanah dan dapat dijamin ke bank untuk modal usaha.

Harapan saya, kampung ini cepat berkembang dan sertifikat segera diterbitkan, setelah semua administrasi dilengkapi. Tujuannya, nanti setelah sertifikat ini terbit bisa dibangun bangunan fisik dan infrastruktur untuk mendukung pariwisata pada lahan ini, sehingga nanti bisa dikelola bersama oleh warga yang memiliki hak ini.

Apalagi Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari nantinya akan dilintasi oleh tol Serang-Panimbang, dan ribuan wisatawan akan datang setiap minggu ke Tanjung Lesung, sehingga kedepan masyarakat harus mampu menangkap peluang usaha tersebut.

### **Pemaparan dari Kepala Kantor BPN Tangerang Himsar, A.Ptnh**

Sebelum kami memaparkan perkembangan program PTSL, izinkan kami mengeluhkan sedikit masalah SDM PNS yang kurang, saat ini PNS sejumlah 55, petugas ukur 5, tahun depan akan pensiun 10 orang. Ini menjadi kendala kami dalam memberikan pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan pada hari Sabtu kami juga memberikan layanan rutin dari pukul 09.00 sd 12.00.

Kendala kami dalam program PTSL, adalah belum tervalidasinya pengajuan PTSL KTPnya belum tervalidasi, sehingga harus bolak-balik ke Disdukcapil, selain itu banyak pemilik tanah berada di luar kota sehingga menghambat PTSL.

Terkait kerjasama dengan Pemkab Tangerang, sejauh ini sangat konstruktif karena bapak Bupati memberikan evaluasi dengan mengundang kades agar menyelesaikan dan membantu menyelesaikan PTSL.

Untuk tanah wakaf, kita kerjasama dengan Kemenag, karena petugas KUA adalah PPAT tanah wakaf, Kemenag minta KUA memaksimalkan tanah wakaf agar bisa disertifikatkan.

Terkait permasalahan tanah dalam Pembangunan Runway 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta masih menyisakan 4 bidang belum diselesaikan, dari 5000 bidang di Kab Tangerang, pemilik 4 bidang tidak datang atau hadir ketika kami undang dan salah satu diantaranya adalah DL Sitorus.



## DAFTAR ISI

### 01 DATA UMUM PERTANAHAN

- Peta Lokasi PTSL
- Jumlah Bidang Terdaftar

01

### PTSL

- Jumlah Desa PTSL
- Anggaran PTSL
- Realisasi Fisik PTSL
- Hambatan dan Kendala

03

### SOSIALISASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

- Kepala Kantor BPN Kabupaten Tangerang
- Polresta Tangerang
- Kejari Tangerang
- Sekda Kabupaten Tangerang

05



### 02 PROFIL KANTOR

- Sumber Daya Manusia
- Peralatan Ukur

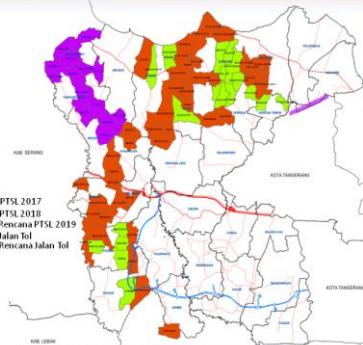
### 04 DOKUMENTASI PENYULUHAN

- Tanggal Penyuluhan
- Sumber Biaya PTSL

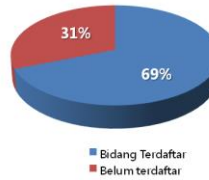
### 06 PENANGANAN MASALAH

- Bekap Perkara
- Penanganan Perkara

## 01 DATA UMUM PERTANAHAN



Estimasi Jumlah Bidang (DHKP)	Jumlah Bidang Terdaftar*		Bidang Belum Terdaftar
	Dipetakan	Belum Dipetakan	
1.040.145	611.270	105.621	323.254



Luas Wilayah: 959,60 km<sup>2</sup>  
 Koordinat 106°20' - 106°43' BT dan 6°00' - 6°20' LS  
 Terdiri dari: 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa

\* Sumber: kkp.atrbpn.go.id Tgl. 15-01-2019 Jam: 08:59

## 03 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Total lokasi PTSL : 39 Desa/Kelurahan, 13 Kecamatan



### ..HAMBATAN DAN KENDALA:

1. Masalah validasi NIK masih menjadi faktor penghambat percepatan penyelesaian sertipikat;
2. Banyak bidang tanah yang dimiliki oleh warga di luar wilayah PTSL;
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pelaksana PTSL di BPN Kabupaten Tangerang.

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (Rp)	%	FISIK	%
051	Penyuluhan	51.923.000	37.703	51.920.000	100,00		100,00
052	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	4.202.714.000	37.703	4.125.826.000	98,17	37.703	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.254.635.000</b>	<b>37.703</b>	<b>4.177.746.000</b>	<b>98,19</b>	<b>37.703</b>	<b>100,00</b>
051	Penyuluhan	446.400.000	40.000	443.555.000	99,36	40.000	100,00
052	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	6.621.265.000	40.000	6.230.940.000	94,10	40.000	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.067.665.000</b>	<b>40.000</b>	<b>6.674.495.000</b>	<b>94,44</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>
051	Penyuluhan	783.432.000	70.200	338.182.000	43,17	30.200	43,02
052	Pengumpulan Data (data bukti hak/atas hak)	2.226.744.000	70.200	1.630.108.000	73,21	50.671	72,00
053	Pemeriksaan Tanah	4.899.960.000	70.200	3.563.151.600	72,72	50.671	72,00
054	Pemeriksaan SK Hak/Pengambilan Data Fisik dan Yandis	140.400.000	70.200	119.100.000	84,83	50.671	72,00
055	Pemerbitan Sertipikat	730.080.000	70.200	548.305.000	75,10	50.671	72,00
056	Pelaporan	140.400.000	70.200	105.700.000	75,28	50.671	72,00
	<b>PENYERAHAN SERIPIKAT</b>	-	-	-	-	15.153	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.921.016.000</b>		<b>6.304.547.400</b>	<b>70,67</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>20.243.316.000</b>		<b>17.136.789.200</b>	<b>84,75</b>		

## 04 DOKUMENTASI PENYULUHAN

Penyuluhan PTSL Kab. Tangerang dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Januari sampai dengan Minggu kedua Februari 2018 sebanyak 39 Desa oleh 6 TIM Percepatan.



### BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

NO	KEGIATAN	PEMBIAYAAN
1.	Penyiapan Dokumen (Riwayat Tanah, SKKD, dll)	Berdasarkan SKB 3 Menteri, biaya ini dapat dibiayai dari APBD PEMDA, namun jika tidak biaya ini dibebankan kepada masyarakat
2.	Pengadaan Patok dan Meterai	
3.	Kegiatan Operasional Petugas Desa	
4.	Kewajiban Pajak (PBB, BPHTB, PPH), Biaya Akta	Masyarakat

### BIAYA PENERBITAN SERTIPIKAT

NO	KEGIATAN	PEMBIAYAAN
1	Penyuluhan	APBN (DIPA Kem. ATR/BPN) Tidak Dibebankan Kepada Masyarakat
2	Pengukuran Bidang Tanah	
3	Pengumpulan Data Yuridis	
4	Pemeriksaan Tanah	
5	Penerbitan SK/ Pengesahan Data Fisik Dan Yuridis	
6	Penerbitan Sertipikat	
7	Pelaporan	

## 05 SOSIALISASI DENGAN INSTANSI TERKAIT (13 MARET 2018)



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN** : Penjelasan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia, dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Biaya Persiapan PTSL, serta Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018



**KAPOLRES** : Dukungan POLRI dalam pelaksanaan PTSL, pentingnya sertipikat tanah untuk mengurangi sengketa pertanahan dan peran sertipikat untuk mengurangi kriminalitas



**KEJAKSAAN NEGERI** : Proyek Strategis Nasional dalam hal ini PTSL akan mengedepankan Proses Administrasi Pemerintahan melalui pengawas intern dalam hal ini Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP).



**SEKDA KAB. TANGERANG MEMBERIKAN ARAHAN DAN MEMBUKA ACARA**: Pemerintah Kabupaten Tangerang mengapresiasi Kegiatan PTSL ini karena diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah menginstruksikan pada jajaran Camat dan Kepala Desa untuk membantu dan mensukseskan Program PTSL. Sekretaris Daerah menyampaikan pada Tahun Anggaran 2018 memberikan bantuan kepada BPN untuk pembangunan gedung arsip sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) hal ini di maksudkan untuk menampung warkah yang semakin tahun semakin banyak dengan adanya program PTSL ini.

## 06 PENANGANAN MASALAH

### • Rekapitulasi Jumlah dan Penyelesaian Sengketa/Konflik

Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya	Jumlah Kasus Tahun Berjalan	Jumlah Keseluruhan Kasus			Penyelesaian Kasus			Sisa Kasus
		Berat	Sedang	Ringan	K1	K2	K3	
25	21	6	39	1	16	-	20	10

Keterangan:

**Klasifikasi Masalah Pertanahan**

Sederhana/Ringan : Pengaduan masalah yang bersifat teknis, dan/atau bukan merupakan kewenangan ATR/BPN

Sedang : Sengketa Hak yang berdimensi hukumnya sudah jelas penyelesaiannya tinggal penempatan hukumnya

Berat : Sengketa Hak berdimensi luas (dimensi hukum, sosial politik), melibatkan banyak pihak, berpotensi terjadinya konflik horisontal

**Kriteria Penanganan Kasus**

K1 : Keputusan pembatalan produk Kementerian/Kanwil/Kantah, Kesepakatan Damai dan/atau Surat Penolakan

K2 : Surat sertipikat dari Menteri/Ditjen/Kakanwil kepada Kakanwil untuk mengocok permohonan salah satu pihak yang bersengketa dan/atau Penetapan mengenai status subjek dan objek tanah sengketa yang penatapannya masih menunggu syarat lain

K3 : Surat Pemberitahuan bahwa penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur hukum disertai alasan dan pertimbangan

### • Jumlah dan Capaian Penanganan Perkara Pertanahan

Jumlah Perkara Tahun Sebelumnya		Jumlah Perkara Tahun Berjalan (2018)		Perkara Masih ditangani								
Pdt	PTUN	Pdt	PTUN	Pdt				PTUN				
				PN	PT	MA	PK	PTUN	PTUN	MA	PK	
62	9	37	8	56	11	29	3	3	3	8	6	-





### Tanya Jawab yang dipandu Ketua Tim Kunspek

Terimakasih atas pemaparan yang sangat baik, untuk selanjutnya kami meminta anggota Komisi II DPR mengajukan pertanyaan yang berguna sebagai bahan kita Rapat Kerja dengan Kementerian ATR/BPN RI

Yandri Susanto

1. Perubahan RT RW terkait alih fungsi lahan sekarang beberapa persen dan seberapa besar untuk kebaikan republik ini. Agar laju pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati segenap rakyat bukan orang yang mampu saja
2. Bagaimana dengan persoalan pengalihan asset daerah terkait pemekaran daerah, perpindahan asset dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangsel, dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang. Ada masalah tidak, karena hal tersebut terjadi antara Kota Serang dengan Kab Serang sampai saat ini tidak selesai juga
3. Kita ingin peta SDM ASN secara nasional agar persoalan ASN ini dapat dipetakan masalahnya secara jernih

Edi Kusumawijaya

1. Dalam sosialisasi reforma agraria, PTSL yang saya lakukan di Dapil saya Banten 2 banyak masukan dan pertanyaan. Menurut mereka ada permasalahan aparatur di bawah, yakni ketika BPN meminta kecamatan membentuk pokmas, yang anggotanya para tokoh masyarakat, para ketua RT-RW, dan aparat BPN sendiri, tugas mereka menentukan harga sertipikat antara antara 1 juta -2juta atau 3 juta. Sehingga menurut mereka berdampak pengukuran tersendat karena tidak dilaporkan kades, yang mengukur di lapangan adalah pokmas tadi. Menurut mereka uang itu dibagi-bagi untuk para Ketua RT-RW, anggota Polri, Babinsa, para tokoh masyarakat, wartawan. Saya minta perlu diawasi, jangan sampai ada manipulasi dalam program PTSL ini.

2. Untuk dana desa, tahun 2019 ditargetkan 2, 5 milyar/tahun kalau melihat laporan yang kita terima di Kab tangerang, 80 kades terindikasi penyelewengan dana desa, mungkin karena kurang paham. Kalau ini tertarungkap kita malu sebagai Komisi II DPR RI. Kita juga minta ORI untuk mengawasi hal2 tersebut.
3. Kampung Dadap di sekitar bandara, ada persoalan pertanahan di situ dimana yang menunggu adalah para preman dulu sih Hercules. Padahal menurut informasi tanah tersebut adalah tanah negara milik Kemenkeu.
4. Masalah pengembang di Kab Tangerang dalam kaitan hubungan dengan masyarakat sekitar, Karena banyak kampung tradisional di tengah kota satelit. Ada sebuah kampung di yang tergenang di sekitar BSD, mereka mengalami kesulitan menangani masalah karena berada di tengah kota satelit. Beberapa waktu lalu ada tanah seluas 13 ha milik masyarakat, tapi masyarakat tersebut justru ditahan oleh polisi dan diproses sampai di pengadilan. Akhirnya mereka dipulangkan. Nah masalah seperti ini kita minta aparat pemerintah bertindak netral, tidak berpihak pada para pengembang yang memiliki akses pada kekuasaan. Sehingga kedepan lahan-lahan di pantura seperti di teluk naga, mauk dsb, konon sudah punya 9 naga, mohon perhatian dengan seksama karena kalau tidak diperhatikan maka akan jadi masalah.

#### Beni Sudrajat

1. Bagaimana dengan program PTSL, di Kabupaten Pandeglang karena sampai saat ini belum jalan untuk itu mungkin perlu sosialisasi

#### Tuti Rosdiono

1. Bagaimana dengan masalah sampah di Kabupaten Tangerang. Karena sampah terkait dengan kesehatan, di tangerang 800 industri sehingga tentu ada limbah industri. Untuk itu perlu insentif agar permasalahan sampah dapat diselesaikan.

#### Mardani Ali Sera

1. Arsip digitalisasi bagus sekali, bagaimana peta 3 dimensi geospasial dapat menjadi perhatian ATR BPN.
2. Perlu tata ruang terintegrasi untuk jabotabek. Agar 100 tahun bisa dipakai sesuai pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi-industri. Sehingga pemanfaatan ruang hijau terjaga, dengan demikian dapat menjaga pola hidup sehat.



## **Jawaban dari Para Mitra**

### **1. Sekda Kabupaten Tangerang Drs. Moch Maesyah Rasyid, MSi.**

Di Kab. Tangerang ada proyek strategis nasional yakni perluasan Bandara Soetta. Secara letak maka terminal 2 dan 3 ada di Kabupaten Tangerang, sementara Terminal 1 berada di Kota Tangsel. Saat ini proyek strategis nasional membutuhkan lahan seluas 750 ha, untuk pembangunan run way 3. Dalam perluasan tersebut ada 3 desa Kabupaten Tangerang yang terdampak, yakni Desa Rawa Rengas, Desa Bojong Renged, dan Desa Burung, mereka harus pindah, maka biasanya mereka akan pindah ke dekat lokasi tempat tinggal, tapi masalahnya daerah dekatnya merupakan lahan pertanian. Ini jadi masalah karena pemda, harus menyesuaikan RTRW untuk memberikan ruang hidup. Masalah yang biasanya muncul kemudian adalah urbanisasi. Apalagi perluasan bandara ada pembangunan jalan tol BSD ke Balajara terus ke Ngadep dan ke bandara itu sendiri. Kami Pemda perlu mengantisipasi dampak sosial ekonomi terkait proyek strategis nasional, agar tidak menimbulkan persoalan sosial di masa yang akan datang.

Secara parsial akibat pembangunan bandara dan jalan tol, akhirnya masyarakat menggunakan lahan pertanian menjadi pemukiman. Untuk pemda sedang memikirkan lapangan kerja. 1000 sampai 3000 an KK. Mereka pindah lapangan kerja tidak ada pekerjaan maka pemda akan membuka lapangan kerja. Mereka sebelumnya bekerja sebagai petani maka pemda membangun sarpras, untuk jualan palawija tidak lagi pertanian sawah. Selanjutnya bapak Bupati memerintahkan hasil pertanian akan dikelola oleh Bumdes dan BUMD untuk dikemas dan dijual sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada dijual langsung ke pasar tradisional.

Masalah asset daerah pasca pemekaran, Kab Tangerang sebagai kabupaten induk sudah menyelesaikan asset terkait pemekaran. Tapi kami akui masih beberapa permasalahan dalam penyerahan asset dari Kab Tangerang ke Kota Tangerang. Dalam beberapa hari ke depan ada 56 titik akan diserahkan dari Pemkab Tangerang ke Pemkot Tangerang dan selanjutnya ada 7 titik akan diserahkan dari Pemkot ke Pemkab. Dan, kami akan meminta DPRD Kabupaten Tangerang menyelesaikan perdanya.

Untuk Program PTSL, kami telah mengundang camat dan kades untuk menyukseskan PTSL. Termasuk para Ketua RT dan RW, untuk mengatasi persoalan pungli di lapangan sudah ada SKB 3 Menteri, biaya PTSL dapat dibiayai dari APBD PEMDA, namun jika tidak biaya ini dibebankan kepada masyarakat. Untuk itu sudah kami sudah meminalisir persoalan-persoalan di lapangan.

Terkait dana desa berjalan lancar, hanya ada 5 desa tidak dicairkan dalam semester kedua (2). Kemudian masalah genangan air dari kampung yang terhimpit oleh BSD sudah diselasaikan dan disalurkan lewat BSD ke Sungai Cisadane. Untuk masalah sampah. Kita belum ada penanganan terpadu, tapi ada program di sekolah yakni kurasaki (kurangi sampah di sekolah kita) dan di kantor-kantor di seluruh Pemkab Tangerang yakni kurasakan (kurangi sampah di kantor).

## **2. Kakanwil BPN Banten Andi Tanri Abeng**

Persoalan ASN yang kurang maka untuk menutupi dengan ditutupi dengan PTT. Agar pelayanan umum dapat berlangsung dengan baik dan tidak diganggu program PTSL.

Kita awalnya membentuk pokmas maka kita sekarang merubah pola dengan *base camp* PTSL, perlunya masyarakat dilibatkan agar berkas tidak ditahan oleh aparat desa, karena kadang berkas di tahan oleh kepala desa . Untuk aparat BPN sudah diinstruksikan untuk tidak ikut-ikutan dengan persoalan pungutan.

Kab. Pandeglang, masih banyak yang belum terdaftar sebanyak 600.000 bidang , yang terdaftar baru 230000 bidang yang terdaftar. Untuk tahun 2019 program PTSL melingkupi 4 kecamatan yaitu Kroncong, Cada sari, Paninmbang . Pada akhir 2018 kami sudah mengundang para untuk belajar aplikasi smartbpn agar mempercepat proses pengukuran. Dengan percepatan tersebut kami optimis ada 52.000 berkas insyallah selesai.

Terkait adanya peta 3 dimensi kami belum ada, dan untuk membuatnya perlu drone dan itu belum ada. Namun beberapa waktu lalu Ikatan Surveyor Indonesia dengan drone berinisiatif dan bekerjasama untuk membuat peta tersebut tapi belum selesai.

Masalah reforma, selain Desa Reforma dengan tanah eks hgu seluas 70 ha, ada juga 30 ha yang telah dijadikan asset pemda diantaranya menjadi hutan kota. Sementara itu ada juga Eks HGU akan kami jadikan untuk hunian, akan tetapi dalam waktu bersamaan Korps Brimob Polri juga minta lahan eks HGU tersebut untuk tempat latihan perang.

Selanjutnya kami mengajukan ke Pemkab Tangerang, Ada asset Kab Tangerang di Kota Tangerang, letaknya persis dibelakang Kantor BPN Kota Tangerang, kebetulan kantor kami sempit , jika diperbolehkan kami mengajukan agar asset tersebut diserahkan kami untuk dijadikan Kantor BPN Kota Tangerang.

## **3. Direktur Penanganan Perkara Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI Ketut Mangku, A.Ptnh, SH, MH**

Terkait persoalan masalah pertanahan kami memiliki Satgas Mafia tanah, dan satgas tersebut di Kabupaten Tangerang pernah menemukan satu lemari penuh girik palsu , dan itu kalau terjadi tentu menjadi masalah tanahapalagi kalau jadi dasar penerbitan sertipikat.

### **III. Penutup**

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Kantor BPN Kab. Tangerang untuk melakukan koordinasi secara berkelanjutan agar program PTSL dapat sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah sebanyak 9 juta bidang pada tahun 2019. Untuk itu, sarana dan prasarana demi terselenggaranya PTSL harus segera diupayakan oleh Kanwil BPN Banten sehingga mendorong tercapainya target yang sudah dicanangkan.

Terkait masalah sengketa lahan terkait proyek strategis nasional pembangunan runway 3 Bandara Soetta, Komisi II DPR RI meminta segenap mitra dari pemerintah agar mengupayakan solusi yang mengedepankan maslahat untuk masyarakat.

**KOMISI II DPR RI**